

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Hendra Lesmana Fauzi ^{1*}

¹Program Pascasarjana, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Komp. LIK Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Kawalu - Tasikmalaya - 46182

*Korespondensi Penulis: hendra.disdik.kotatasik@gmail.com

Abstract: *The government is obliged to increase socialization to the public about the importance of education for people's lives in today's modern era, and vice versa, the government is also obliged to maintain and improve the quality of education in order to obtain human resources who can compete in this era of globalization. One of the efforts to improve the quality of education includes striving for infrastructure in the school environment so that it can support teaching and learning activities that are conducive to the direction of competent and professional teachers, for this reason the School Operational Assistance (BOS) fund is a government policy which is aimed at completing the program. compulsory education with quality education. This research was motivated by a decrease in the number of students and a decline in the quality of education when viewed from the results of the national SD and SMP national examinations in the Tasikmalaya City Education Office. The study used a quantitative approach, with a sample of 69 respondents, the data from the questionnaire were analyzed using path analysis to find the magnitude of the influence of each dimension of the implementation of BOS funds on the quality of schools in SD and SMP Negeri in the Tasikmalaya City Education Office. Based on the research results, it was obtained data that the implementation of the BOS Fund Policy had a very strong influence on the quality of schools in SD and SMP Negeri Kota Tasikmalaya, with a contribution of 54.6%. The variable dimension of BOS Fund Policy Implementation which has the greatest influence on school quality is the resource dimension (26.19%), this means that to improve school quality, the most important thing is to increase the competence of stakeholder resources, including the managerial ability of the Principal teacher competence.*

Keywords: BOS Funds; Policy Implementation; School Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari berbagai unsur pendukungnya, seperti masukan siswa, materi pembelajaran, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, media / buku teks, manajerial, biaya dan lingkungan belajar sebagai bagian dari *input*. Jika setiap komponen sistem penunjang dan penunjang pendidikan didukung penuh maka kualitas proses dan hasil pendidikan akan meningkat. Di antara beberapa unsur dalam sistem pendidikan, tenaga pendidik adalah unsur terpenting dalam menentukan peningkatan kualitas pendidikan.

Harus diakui bahwa sukses atau gagal serta berkembang atau tidaknya pembangunan bidang pendidikan sangat tergantung pada kompetensi dan komitmen guru, keselarasan antara tujuan guru dengan tujuan pendidikan harus efisien, efektif dalam setiap pelaksanaannya. Mengingat begitu besarnya kontribusi guru terhadap kemajuan pendidikan, maka upaya untuk meningkatkan kualitas guru sangatlah penting. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memberikan apresiasi kepada guru dengan mengeluarkan kebijakan guna meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, diantaranya adalah kebijakan pemberian tunjangan profesional guru dan dengan adanya sertifikasi guru yang tak lain bertujuan untuk mewujudkan guru profesional, berkualitas, bermartabat, dan sejahtera.

Menghasilkan seorang guru profesional sangat diperlukan faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut, antara lain lingkungan kerja, tingkat intelegensi, pendidikan, pengalaman lapangan, motivasi, sarana prasarana pendukung proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah membuat kebijakan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lain sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah, diantaranya dalam kelengkapan sarana prasarana pendidikan, pengadaan sumber belajar, serta keperluan lain yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kewajiban belajar selama 6 tahun, 9 tahun, atau bahkan hingga 12 tahun, apalagi setelah otonomi daerah diberlakukan, secara otomatis pemerintah memberikan hak kepada semua daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk di bidang pendidikan. UU No. 20 tahun 2003 mengatur bahwa setiap warga negara yang berusia antara 7 dan 15 tahun harus mengenyam pendidikan. Pasal 34 ayat 2 mengatur bahwa pemerintah menjamin penyelenggaraan wajib belajar sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar secara cuma-cuma, dengan demikian wajib belajar merupakan kewajiban pemerintah dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Dana BOS dimaksudkan untuk digunakan di sekolah-sekolah dasar di Indonesia guna mengurangi beban biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program Wajib 9 tahun yang berkualitas. Selain itu, dana BOS dapat digunakan sekolah untuk melengkapi infrastruktur guna mendukung kegiatan pengajaran.

Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di beberapa daerah termasuk di Kota Tasikmalaya menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, dengan alasan tidak diterima di sekolah negeri, serta mahal biaya pendidikan di lembaga pendidikan swasta, menjadi salah satu faktor bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Berikut data jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se Kota Tasikmalaya untuk tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Data Siswa SD dan SMP Negeri se Kota Tasikmalaya

Jenjang	2016/2017		2017/2018		2018/2019	
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
SD	229	62.169	229	63.296	229	62.705
SMP	75	28.933	75	28.626	75	27.797
Jumlah	304	91.102	304	91.922	304	90.502

Sumber: Disdik Kota Tasikmalaya, 2020

Tabel 1. menunjukkan data jumlah siswa SD dan SMP Negeri se Kota Tasikmalaya, dimana pada Tahun Ajaran 2018/2019 terjadi penurunan jumlah siswa sebanyak 1.420 siswa. Fenomena lain yang terjadi dalam penurunan jumlah siswa sekolah dasar negeri, juga sebagai akibat rendahnya mutu pendidikan sekolah negeri, masyarakat lebih memilih sekolah-sekolah dengan label agama secara terpadu. Meski dana BOS diharapkan dapat melengkapi sarana prasarana sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran, serta kegiatan-kegiatan pelatihan guru dalam usaha meningkatkan kompetensi guru, namun kenyataannya terjadi penurunan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.

Menurunnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, hal ini dimungkinkan adanya trend baru di masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di lembaga pendidikan swasta yang berlabel *full day school*, *boarding school* atau berlabel sekolah terpadu, yang notabene memberikan pendidikan lebih dalam hal pendidikan karakter dan keagamaan, walaupun dengan biaya yang lebih mahal, selain itu asumsi masyarakat yang menilai kinerja sekolah negeri yang kurang berperestasi, hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai ujian nasional yang merupakan ukuran standar mutu sekolah bagi masyarakat. Memang jika dilihat nilai rata-rata UN SMP Negeri se Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir menurun, dan selalu masih di bawah nilai rata-rata UN SMP swasta, dimana pada tahun ajaran 2017/2018 nilai rata-rata SMP negeri di Kota Tasikmalaya mencapai 54,63 sedangkan nilai rata-rata UN SMP swasta mencapai 57,70, dan pada tahun ajaran 2018/2019 nilai rata-rata SMP negeri di Kota Tasikmalaya mencapai 52,58 sedangkan nilai rata-rata UN SMP swasta mencapai 53,06. Selain nilai terjadi pula penurunan jumlah peserta UN SMP Negeri dimana pada Tahun Ajaran 2017/2018 sebanyak 6836

siswa menjadi 6596 pada Tahun Ajaran 2018/2019, sedangkan jumlah peserta UN pada SMP swasta meningkat tiga tahun terakhir ini.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa indikator yang masih kurang dalam implementasi kebijakan dana BOS di SD dan SMP se Kota Tasikmalaya, khususnya terkait peningkatan kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, antara lain:

1. Alokasi dana BOS kurang disosialisasikan secara transparan, hal ini dapat dilihat masih adanya sekolah yang belum mengumumkan secara terbuka mengenai alokasi dana BOS.
2. Kebijakan dana BOS belum dapat meningkatkan sumberdaya yang ada, terutama kompetensi guru, hal ini dilihat dari menurunnya nilai UN SD dan SMP negeri se Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir.
3. Sikap guru sebagai unsur pelaksana kebijakan yang masih belum memaksimalkan kebijakan dana BOS, contohnya Kelompok Kerja Guru (KKG) yang didanai dari dana BOS dan dilakukan dua minggu sekali tidak dihadiri oleh semua guru. Selain itu dari data SMP Negeri se Kota Tasikmalaya, masih terdapat guru yang tidak membuat perencanaan pembelajaran, dan itupun bukan sepenuhnya dibuat oleh guru sendiri, tetapi hanya men-*download* atau meng-*copy* dari sekolah lain yang sudah tentu tidak sesuai dengan karakteristik sekolah setempat.

Dengan melihat permasalahan tersebut diduga implementasi kebijakan dana BOS di SD dan SMP Negeri se Kota Tasikmalaya masih terdapat kekurangan di beberapa indikator. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Mutu Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya."

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, disebutkan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.. Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2019 disebutkan bahwa dana yang diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Suatu kebijakan bisa dilihat sebagai sebuah konsep filosofis suatu produk, menurut Donovan dan Jackson (Winarno, 2013, hal. 16), kebijakan adalah serangkaian acuan untuk situasi yang diharapkan, dan merupakan rekomendasi dalam suatu proses, dengan cara tersebut diharapkan dapat meminimalisir suatu permasalahan, kebijakan juga merupakan suatu proses negosiasi guna merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Pendapat ini mempunyai pengertian bahwa pemerintah diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti berbagai masalah dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya serta dapat mengakomodir berbagai ide atau masukan dari semua pihak, untuk dapat menghasilkan sebuah produk kebijakan secara transparan.

Tahapan terpenting dalam suatu kebijakan adalah tahapan implementasi, dan biasanya tahap ini seringkali diasumsikan sebagai pelaksanaan yang telah disepakati legislatif dengan pejabat lainnya, dan seringkali dianggap kurang berarti. Namun sebenarnya, implementasi merupakan tahapan yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena suatu kebijakan menjadi sangat berarti jika diimplementasikan secara benar, artinya tahapan ini dibutuhkan keseriusan semua pihak agar tujuan dibuatnya suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Mengenai implementasi kebijakan Edward III (Winarno, 2013, hal. 19) berpendapat bahwa sebelum melangkah ke tahapan implementasi, terdapat dua pernyataan utama: (1) faktor-faktor

apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan? dan (2) faktor-faktor apa saja yang dapat menghambatnya? Dengan adanya dua pertanyaan ini, Edward III merumuskan empat faktor sebagai syarat terpenting dalam keberhasilan tahapan implementasi sebuah kebijakan: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) sikap/disposisi; (4) struktur birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi termasuk pola kerja dalam birokrasi. Ke 4 faktor ini sebagai kunci dalam keberhasilan tahapan pelaksanaan sebuah kebijakan.

Suatu kebijakan, baik positif maupun negatif, pasti akan berdampak. Dampak positif mengacu pada dampak yang mungkin ini adalah hasil dari kebijakan dan menumbuhkan manfaat terhadap lingkungan, namun jika dampaknya tidak akan menguntungkan lingkungan, hal ini disebut sebagai dampak negatif. Dampak adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas, dampak kebijakan merupakan dampak dari keseluruhan kebijakan dalam kehidupan nyata. Anderson percaya bahwa semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, termasuk langsung dan masa depan, harus diukur dengan efek simbolis atau aktual. Keluaran kebijakan adalah segala sesuatu yang dicanangkan oleh pembuat kebijakan, dimana hal ini diukur menggunakan standar yang telah ditetapkan. Angka-angka yang muncul hanya sedikit menginformasikan tentang hasil atau akibat adanya kebijakan, karena penentuan hasil kebijakan harus memperhatikan perubahan lingkungan atau sistem politik yang diakibatkan oleh tindakan politik.

Kebijakan pendanaan BOS adalah agenda pemerintah dimana tujuan utamanya menyediakan biaya operasional nonpersonel. Pengeluaran Non Kepegawaian adalah pengeluaran untuk pengeluaran bahan atau peralatan pendidikan, serta listrik, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi, konsumsi adalah biaya tidak langsung dalam bentuk pajak, asuransi, dll.

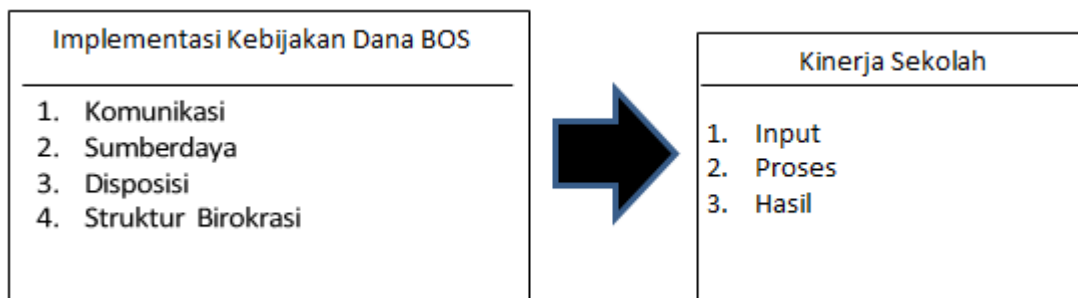
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Biaya Pendidikan, biaya operasional nonpersonel adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendanai operasional nonpersonel selama satu tahun yang merupakan bagian dari total biaya yang dibutuhkan. Departemen mampu menyelenggarakan proses pembelajaran secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Permendiknas No. 320 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dan Penerimaan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja para pendidik tersebut, mengemukakan bahwa tujuan dari rencana BOS untuk mengurangi beban pendanaan pendidikan yang bermutu tinggi pada masyarakat. Rencana BOS adalah:

1. Menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa SD, SMP dan SMA Negeri.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Mutu sekolah menurut Slamet (2011, hal. 616) adalah “pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses atau perilaku sekolah yang dapat diukur dari efektifitas, produksifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan modal kerja.” Kinerja sekolah yang diukur dengan prestasi belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru sebagai pengajar sekaligus pendidik. Kinerja sekolah dalam penelitian ini merujuk pada peningkatan mutu pendidikan atau mutu sekolah dengan indikator yang dirumuskan oleh Mulyasa (2012, hal. 26), ada sejumlah indikator utama untuk menilai mutu pendidikan suatu lembaga atau satuan unit pendidikan. Indikator-indikator tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga rumpun, yaitu input, proses dan hasil.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba menggambarkan model kerangka dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah suatu fenomena yang muncul akibat pemberian perlakuan atau tindakan tertentu.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan untuk melaksanakan program pendidikan, sehingga dana BOS merupakan faktor terpenting dalam tercapainya kinerja sekolah yang baik. Artinya dana BOS merupakan faktor terpenting dalam peningkatan kinerja sekolah, melalui dana BOS yang nantinya dapat mempermudah pelaksanaan program sekolah.
3. Mutu sekolah dalam penelitian ini merujuk pada peningkatan mutu pendidikan atau mutu sekolah dengan indikator yang dirumuskan oleh Mulyasa (2012, hal. 26), ada sejumlah indikator utama untuk menilai mutu pendidikan suatu lembaga atau satuan unit pendidikan. Indikator-indikator tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga rumpun, yaitu input, proses dan hasil.

Oprasionalisasi variabel penelitian dapat dijabarkan dari variabel bebas dan variabel terikat kepada dimensi dan indikator seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No Item
Implementasi Kebijakan Dana BOS (X)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi dana BOS	Ordinal
	2. Sumberdaya	b. Penyusunan RKAS	
		3. Disposisi	a. Kompetensi Guru
	4. Struktur Organisasi		b. Sarana/prasarana belajar
3. Disposisi		c. Sumber belajar	
	4. Struktur Organisasi	a. Guru memberikan usulan	
4. Struktur Organisasi		b. Sikap Kepala Sekolah terhadap usulan guru	
	4. Struktur Organisasi	c. Evaluasi Kepala Sekolah	
4. Struktur Organisasi		a. Supervisi Diknas	
	4. Struktur Organisasi	b. Dukungan Pemda	
Mutu Sekolah (Y)		1. Input	a. Visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi
	b. Manajerial		
			c. Sumberdaya insani sekolah
	2. Proses	a. Materi ajar, metodologi dan teknologi pengajaran	
		b. Sarana dan prasarana	
			a. Prestasi akademik siswa

b. Prestasi non akademik siswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hipotesis, besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap mutu sekolah di SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya ditentukan oleh dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS. Untuk menguji hipotesis tersebut diperlukan suatu pengolahan data dengan menggunakan analisis jalur dan bantuan program SPSS versi 22.

Adapun untuk perhitungan nilai koefisien jalur antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada tabel koefisien *output* SPSS berikut:

Tabel 3. Nilai Koefisien Jalur dan Korelasi Antar Variabel

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	Y
X ₁		0,304	0,432	0,168	0,191	
X ₂	0,304	1	0,511	0,614	0,393	0,304
X ₃	0,432	0,511	1	0,471	0,104	0,432
X ₄	0,168	0,614	0,471	1	0,264	0,168
X ₅	0,304	0,304	0,432	0,168	1	0,191

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

Tabel 3. menunjukkan nilai koefisien jalur dari dimensi-dimensi variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap mutu sekolah, dan nilai korelasi antar tiap dimensi pada variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS. Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pengaruh tiap dimensi variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap mutu sekolah dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh X₁, X₂, X₃, dan X₄ terhadap Y

No.	Nama Variabel	Formula	Hasil
1.	Komunikasi (X₁)		
	Pengaruh langsung X ₁ terhadap Y	$\rho_{yX_1} \times \rho_{yX_1}$	0,03648
	Pengaruh tak langsung X ₁ melalui X ₂	$\rho_{yX_1} \times r_{X_1X_2} \times \rho_{yX_2}$	0,02282
	Pengaruh tak langsung X ₁ melalui X ₃	$\rho_{yX_1} \times r_{X_1X_3} \times \rho_{yX_3}$	0,00858
	Pengaruh tak langsung X ₁ melalui X ₄	$\rho_{yX_1} \times r_{X_1X_4} \times \rho_{yX_4}$	0,00847
	Pengaruh total X₁ terhadap Y (rx_{1y})		0,07635
2.	Sumberdaya (X₂)		
	Pengaruh langsung X ₂ terhadap Y	$\rho_{yX_2} \times \rho_{yX_2}$	0,15445
	Pengaruh tak langsung X ₂ melalui X ₁	$\rho_{yX_2} \times r_{X_2X_1} \times \rho_{yX_1}$	0,02282
	Pengaruh tak langsung X ₂ melalui X ₃	$\rho_{yX_2} \times r_{X_2X_3} \times \rho_{yX_3}$	0,020886
	Pengaruh tak langsung X ₂ melalui X ₄	$\rho_{yX_2} \times r_{X_2X_4} \times \rho_{yX_4}$	0,0637
	Pengaruh total X₂ terhadap Y (rx_{2y})		0,26186
3.	Sikap (X₃)		
	Pengaruh langsung X ₃ terhadap Y	$\rho_{yX_3} \times \rho_{yX_3}$	0,01082
	Pengaruh tak langsung X ₃ melalui X ₁	$\rho_{yX_3} \times r_{X_3X_1} \times \rho_{yX_1}$	0,00858
	Pengaruh tak langsung X ₃ melalui X ₂	$\rho_{yX_3} \times r_{X_3X_2} \times \rho_{yX_2}$	0,020886
	Pengaruh tak langsung X ₃ melalui X ₄	$\rho_{yX_3} \times r_{X_3X_4} \times \rho_{yX_4}$	0,01293
	Pengaruh total X₃ terhadap Y (rx_{3y})		0,05321
4.	Struktur birokrasi (X₄)		
	Pengaruh langsung X ₄ terhadap Y	$\rho_{yX_4} \times \rho_{yX_4}$	0,0697
	Pengaruh tak langsung X ₄ melalui X ₁	$\rho_{yX_4} \times r_{X_4X_1} \times \rho_{yX_1}$	0,00847
	Pengaruh tak langsung X ₄ melalui X ₂	$\rho_{yX_4} \times r_{X_4X_2} \times \rho_{yX_2}$	0,063704

Pengaruh tak langsung X_4 melalui X_3	$\rho_{yX_4} \times r_{X_4X_3} \times \rho_{yX_3}$	0,01293
Pengaruh total X_4 terhadap Y (r_{X_4Y})		0,1548
Pengaruh total $X_1 + \dots + X_5$ thd Y	r_{xy}	0,5462
Pengaruh Faktor Lain	$1 - r_{xy}$	0,4538

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

Perhitungan pada tabel 4. menunjukkan bahwa nilai $R^2 = 0,5462$, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS mempengaruhi mutu sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya sebesar 0,5462. Ini artinya 54,62% ($Kd = R^2 \times 100\%$), artinya mutu sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS secara simultan, dan sisanya yaitu 45,38% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Dari nilai R^2 tersebut, diperoleh nilai $R = \sqrt{0,5462} = 0,739$, hasil perhitungan statistik tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS secara simultan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap mutu sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya, dengan kontribusi sebesar 54,62%. Dari tabel 4. dapat dilihat semuanya bernilai positif, hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS berbanding lurus dengan mutu sekolah, artinya semakin baik Implementasi Kebijakan Dana BOS, maka mutu sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya akan meningkat.

Hipotesis menyatakan bahwa dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS (X_1, X_2, X_3 , dan X_4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap mutu sekolah. Untuk menguji hipotesis secara simultan dilakukan dengan uji F statistik. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitasnya < nilai alpha (5%), maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau hipotesis diterima.

Berikut tabel hasil uji F statistik antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Tabel 5. Hasil Uji F Statistik X dengan Y

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	750,752	4	187,688	19,300	,000 ^b
	Residual	622,395	64	9,725		
	Total	1373,146	68			

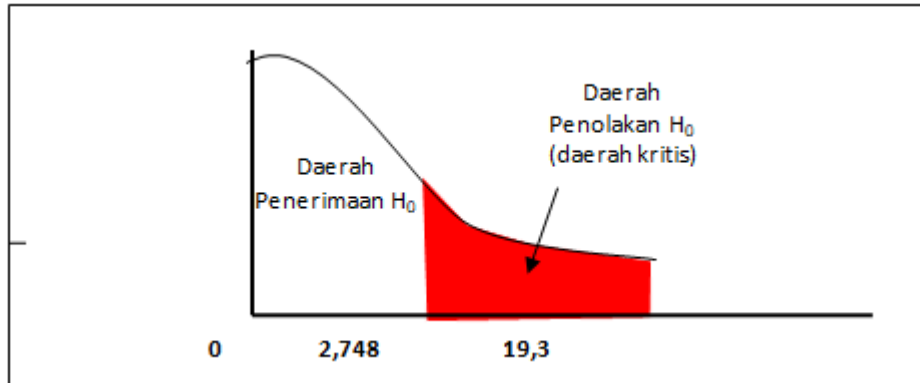
a. Dependent Variable: Mutu Sekolah

b. Predictors: (Constant), struktur Birokrasi, Komunikasi, sikap, Sumberdaya

Hasil uji F dapat dilihat pada *output* ANOVA. Tahap-tahap untuk melakukan Uji F adalah:

- Merumuskan Hipotesis
 H_0 : Tidak ada pengaruh antara dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS (X_1, X_2, X_3 , dan X_4) secara bersama-sama terhadap mutu sekolah
 H_a : Ada pengaruh antara dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS (X_1, X_2, X_3 , dan X_4) secara bersama-sama terhadap mutu sekolah
- Menentukan F_{tabel}
 Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α 5%, df 1 (jumlah variabel - 1) atau $4 - 1 = 3$, dan df 2 ($n-k-1$) atau $69 - 4 - 1 = 64$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} 2,748 (lihat lampiran F_{tabel}).
- Kesimpulan
 Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19,3 > 2,748$), atau $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya Implementasi Kebijakan Dana BOS berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah di SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya.

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap Mutu Sekolah

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh data bahwa dimensi variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap mutu sekolah adalah dimensi sumberdaya (26,19%), pengaruh kedua terbesar dari dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap mutu sekolah adalah pada dimensi struktur biokrasi (15,48%). sedangkan dimensi yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah dimensi sikap (5,32%).

Pengujian secara parsial dilakukan dengan uji – t, untuk mencari nilai t digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 257):

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

n = Jumlah responden

r = koefisien korelasi

Pengujian Hipotesis

Untuk jumlah responden 69, dengan uji dua sisi dan tingkat signifikansi 0,025 diperoleh $t_{tabel} = 1,998$ dengan kriteria pengujian:

H_0 diterima jika $sig > 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika $sig < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung masing-masing dimensi sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai t_{hitung} Dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS

Dimensi	r^2	r	$r \sqrt{n-2}$	$\sqrt{1-r^2}$	t
X ₁	0,076	0,276	2,262	0,961	2,353
X ₂	0,262	0,512	4,189	0,859	4,875
X ₃	0,053	0,231	1,888	0,973	2,021
X ₄	0,155	0,393	3,221	0,919	3,503

Sumber: data diolah

Hipotesis menyatakan bahwa dimensi-dimensi dalam variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS berpengaruh positif terhadap mutu sekolah di SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya. Untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan dengan uji t statistik. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau hipotesis diterima. Berdasarkan uji t dengan kriteria uji dua sisi pada taraf = 0,025 diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,998$ (tabel t), maka hasil uji t statistik antara dimensi-dimensi dalam variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS dengan mutu sekolah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Uji t Masing-masing Dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS

Dimensi	t_{hitung}	t_{tabel}	Keterangan
Komunikasi	2,353	1,998	Ho ditolak (signifikan)
Sumberdaya	4,875	1,998	Ho ditolak (signifikan)
Sikap	2,021	1,998	Ho ditolak (signifikan)
Struktur birokrasi	3,503	1,998	Ho ditolak (signifikan)
Kemampuan Fisik	2,353	1,998	Ho ditolak (signifikan)

Sumber: data diolah

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, penulis membuat kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Dana BOS berpengaruh terhadap mutu sekolah di SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya. Dimensi variabel Implementasi Kebijakan Dana BOS yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap mutu sekolah adalah dimensi sumberdaya, pengaruh kedua terbesar dari dimensi Implementasi Kebijakan Dana BOS terhadap mutu sekolah adalah pada dimensi struktur biokkrasi, sedangkan dimensi yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah dimensi sikap.

Implementasi Kebijakan Dana BOS di SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya sudah termasuk ke dalam kategori baik. Nilai tertinggi terdapat pada dimensi kemampuan fisik, sedangkan skor terendah terdapat pada dimensi daya tangap. Untuk semua item pertanyaan, terdapat nilai tertinggi pada item pertanyaan selama ini Pengawas Disdik mengevaluasi penggunaan dana BOS secara berkala, dan nilai tertinggi lainnya adalah pada pernyataan selama ini Guru mengikuti pelatihan kompetensi di luar sekolah dengan biaya dari dana BOS. Skor terendah terdapat pada item pertanyaan selama ini Pengawas jarang melakukan sidak ke sekolah terkait alokasi dana BOS, dan nilai terendah lainnya terdapat pada item pertanyaan selama ini Kepala Sekolah belum mengakomodir kebutuhan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari dana BOS.

Mutu sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tasikmalaya sudah masuk dalam kategori baik, indikator prosentase tertinggi terdapat pada aspek dimana Guru membimbing penggunaan internet kepada siswa, skor tertinggi lainnya terdapat pada aspek sekolah berusaha melengkapi buku-buku pelajaran dan buku kreatif lainnya diperpustakaan, sedangkan skor terendah terdapat pernyataan responden dimana menurut responden selama ini Guru jarang menggunakan layanan internet yang ada di sekolah dalam KBM, dan Guru jarang membimbing penggunaan internet kepada siswa.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya seringkali melakukan sidak ke sekolah terkait alokasi dana BOS, hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petinjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya Kepala Sekolah mengakomodir kebutuhan guru dalam pelaksanaan pembelajaran dari dana BOS, sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara optimal dengan ketersediaan sarana prasaraa yang dibutuhkan oleh guru.
3. Sebaiknya Guru selalu menggunakan layanan internet yang ada di sekolah dalam KBM, serta membimbing penggunaan internet kepada siswa, agar pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menambah luas wawasan bagi siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2011). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabetha
- Dunn, W. N. (2006). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Cetakan Keenam*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Giroth, L. M. (2010). *Edukasi dan Profesi Pamong Praja: Publik Policy, Studies Good Governance*

- and Performance Driven Pamong Praja*. . Jatinangor: STPDN Press .
- Islamy, I. (2012). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kadir. (2015). *Statistika Terapan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Multazam.
- Mulyasa. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2012). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan : Dengan Ilustrasi Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayati, B. d. (2014). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riduwan. (2012). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta .
- Sedjati, H. W. (2014). *Berbagai Permasalahan Kebijakan Publik dan Implementasi Program*.
Berbagai Permasalahan Kebijakan Publik dan Implementasi Program. Yogyakarta: Amara Books.
- Singarimbun, M. d. (2011). *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta: LP3ES.
- Slamet, P. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No.027, tahun ke-6*. Jakarta: Depdikbud.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, M. (2012). *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Yayasan Bhakti Winaya.